

BAB 3
KARIER ADAM MALIK SEBAGAI MENTERI LUAR NEGERI
INDONESIA TAHUN 1966-1977

3.1 Pengangkatan Adam Malik Sebagai Menteri Luar Negeri

Pada tanggal 3 Oktober 1948 Adam Malik bersama dengan mantan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Partai Murba merupakan partai politik yang didirikan dari gabungan beberapa partai yaitu Partai Rakyat, Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat Jelata. Pimpinan partai Murba adalah Sukarni, Maruto Nitimihardjo, Sutan Dewanis, Samsu Harya Udaya, Pandu Kartawiguna dan Adam Malik.⁸⁰ Partai Murba menganut garis politik anti fasisme, anti imperalis, anti kapitalis dan mendasarkan perjuangan pada kepentingan rakyat. Mereka menghendaki bentuk pemerintahan “sentralisme” artinya kekuasaan negara dan pemerintahan dijalankan oleh Presiden bukan Parlemen. Selain itu, mereka menginginkan agar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diganti kembali dengan Undang-Undang Dasar 1945, keinginan tersebut digaungkan sebagai salah satu janji kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955.

Partai Murba menjadi salah satu peserta Pemilu tahun 1955 dan berhasil mendapatkan sebanyak 199.588 suara yang membuat Murba mendapatkan 2 kursi di Parlemen. Adam Malik terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu tahun 1955. Partai Murba tergabung dalam Kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda dengan mendapat sebanyak empat kursi Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat Priyono, Menteri Urusan

⁸⁰ Adam Malik, *op.cit.*, hlm. 221.

Pengerahan Tenaga Rakyat A.M. Hanafi, Menteri Urusan Veteran Chairul Saleh dan Menteri Negara Mohammad Yamin.⁸¹ Kabinet Djuanda digantikan oleh Kabinet Presidensial setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.⁸² Presiden Soekarno yang menjabat Presiden sekaligus Perdana Menteri membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Kerja dengan tetap memasukan perwakilan partai Murba dalam kabinet. Tokoh-tokoh partai Murba yang lain yaitu Chairul Saleh diangkat sebagai Ketua MPRS dan Adam Malik ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPAS).⁸³

Anggota DPAS terdiri dari berbagai golongan masyarakat dan kelompok politik yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam beberapa situasi dan kebijakan tertentu. Adam Malik menjabat sebagai anggota DPAS hanya dalam jangka waktu dua minggu, ia kemudian dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Soviet dan Polandia pada tanggal 28 November 1959. Pengangkatan menjadi Duta Besar merupakan titik awal dimulainya kiprah Adam Malik sebagai Diplomat. Adam Malik diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk mengurus pembelian persenjataan dari Uni Soviet untuk perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda⁸⁴. Pada tanggal 7 Maret 1962 Presiden Sekarno menugaskan secara khusus kepada Adam Malik untuk

⁸¹ *Ibid*, hlm. 227.

⁸² Dekrit Presiden merupakan maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Lihat dalam Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 525-526.

⁸³ Adam Malik, *op.cit.*, hlm. 239.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 240.

memimpin Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di Middleburg, Amerika Serikat. Perundingan Middleburg adalah pertemuan pertama antara Indonesia dengan Belanda pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) sekaligus menjadi pelopor perundingan-perundingan yang diadakan sesudahnya. Indonesia dan Belanda serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak penengah menandatangani Perjanjian New York sebagai pertanda pemindahan kekuasaan atas Iria Barat dari Belanda kepada Indonesia.⁸⁵ Keberhasilan Adam Malik dalam memimpin Delegasi Indonesia dalam perundingan Irian Barat membuat namanya dimasukkan menjadi salah satu Menteri oleh Presiden Soekarno yang saat itu tengah melakukan *reshuffle* kabinet dari Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV. Adam Malik diangkat menjadi Menteri Perdagangan pada tanggal 4 Desember 1963. Adam Malik tetap menjabat sebagai Menteri Perdagangan saat terjadi pergantian kabinet dari Kabinet Kerja IV menjadi Kabinet Dwikora I tanggal 27 Agustus 1964.⁸⁶ Adam Malik mengalami pergeseran posisi menjadi Menteri Utama atau Menteri Koordinator Untuk Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin pada tanggal 31 Maret 1965.

Kabinet Dwikora I sendiri merupakan kabinet kelima yang dibentuk oleh Presiden Soekarno sekaligus kabinet pertama yang dibentuk sebagai bentuk persiapan dalam upaya “Ganyang Malaysia”.⁸⁷ Konfrontasi antara Indonesia

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 244.

⁸⁶ *Duta Masyarakat*, 28 Agustus 1964. Dapat dilihat pada lampiran 6.

⁸⁷ “Ganyang Malaysia” merupakan slogan yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Inggris yang membentuk Federasi Malaysia. Soekarno menganggap pembentukan Malaysia merupakan kolonialisme gaya baru yang akan mengancam keamanan Indonesia. Lihat dalam Merle Calvin Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 537-539.

dengan Malaysia membuat Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964. Isi Dwikora sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan revolusi Indonesia dengan memperkuat persatuan nasional, waspada ancaman luar negeri dan bersiap tempur.
2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Sabah, Serawak dan Singapura untuk menghancurkan negara boneka Malaysia.⁸⁸

Adam Malik sebagai Menteri Koordinator Ekonomi Terpimpin mengalami pergeseran posisi setelah diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II sekaligus Menteri Luar Negeri pada tanggal 18 Maret 1966. Adam Malik diangkat sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Soebrandio.⁸⁹ Adam Malik menjabat Waperdam II sekaligus Menteri Luar Negeri pada Kabinet Dwikora II sampai tanggal 27 Maret 1966.

Pada tanggal 27 Maret 1966 Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* Kabinet secara keseluruhan dengan mengganti Kabinet Dwikora II dengan Kabinet Dwikora III. Presiden Soekarno mengangkat Presidium Kabinet yang bertugas untuk memilih calon Menteri yang akan dipilih menjadi Menteri Kabinet Dwikora III. Anggota Presidium Kabinet tersebut adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Ruslan Abdoelgani, Idam Chalid dan J. Leimina.⁹⁰ Pada tanggal 30 Maret 1966 diumumkan pembentukan Kabinet Dwikora III dengan jumlah Menteri sebanyak 101. Adam Malik terpilih sebagai Waperdam untuk Urusan Sosial dan Politik merangkap Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Dwikora III.

⁸⁸ Ismaun, *Sejarah Indonesia 1949-1965 Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, 1998, hlm. 35.

⁸⁹ Soebrandio dan 15 Menteri lainnya ditangkap akibat dugaan terlibat PKI. Mereka ditangkap atas perintah Panglima Angkatan Darat Soeharto yang memperoleh kewenangan melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Lihat dalam *Pewarta Surabaya*, 15 Oktober 1965 dalam lampiran 7.

⁹⁰ Kepres No 4/3 /1966 tentang pengangkatan Adam Malik sebagai Presidium Kabinet dapat dilihat dalam lampiran 8.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang diketuai oleh Abdul Haris Nasution meminta Presiden Soekarno untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan yang telah dilakukan pada masalah Gerakan 30 September. Presiden Soekarno menindaklanjuti permintaan MPRS dengan membuat sebuah pidato pertanggungjawaban yang diberi nama “Nawaksara” dan dibacakan pada Sidang Umum IV MPRS tanggal 22 Juni 1966. MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno karena isinya sama sekali tidak menyinggung peristiwa Gerakan 30 September dan meminta untuk melengkapi pertanggungjawabannya. MPRS kemudian memerintahkan Soeharto untuk membentuk kabinet baru tanpa mencopot Soekarno dari posisi Presiden dengan dasar hukum TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966. Soeharto membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Ampera I pada tanggal 28 Juli 1966 dengan jumlah Menteri sebanyak 28. Adam Malik terpilih sebagai Menteri Urusan Politik merangkap Menteri Luar Negeri.

Presiden Soekarno menyampaikan laporan tertulis sebagai jawaban atas penolakan “Nawaksara” dan menamainya dengan “Pelengkap Nawaksara” pada tanggal 10 Januari 1967. MPRS menolak “Pelengkap Nawaksara” karena Presiden menolak memberi pertanggungjawaban Gerakan 30 September dengan alasan tidak termasuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII/1967 pada tanggal 12 Maret 1967 yang berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan dan negara dari Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.⁹¹ Pejabat Presiden Soeharto membentuk kabinet baru

⁹¹ Merle Calvin Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 575.

dengan nama Kabinet Ampera II tanggal 17 Oktober 1967. Kabinet dirampingkan dengan jumlah Menteri hanya 23. Adam Malik tetap Menjadi Menteri Urusan Luar Negeri pada Kabinet Ampera II.

Presiden Soeharto dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS pada tanggal 26 Maret 1968 untuk masa jabatan lima tahun.⁹² Presiden Soeharto membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Pembangunan I pada tanggal 10 Juni 1968. Adam Malik tetap menjadi Menteri Luar Negeri dan menjabat sampai Kabinet Pembangunan II berakhir pada tanggal 29 Maret 1978.

3.2 Kebijakan Adam Malik Sebagai Menteri Luar Negeri

Adam Malik pertama kali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 18 Maret 1966. Adam Malik dilantik sebagai Menteri *Ad Interim* menggantikan Soebandrio yang ditangkap karena terafiliasi PKI. Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri secara berturut-turut pada Kabinet Dwikora III dan Kabinet Ampera I pada masa Orde Lama serta Kabinet Ampera II, Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II pada masa Orde Baru. Adam Malik terhitung menjabat Menteri Luar Negeri sejak 18 Maret 1966 hingga 1 Oktober 1977.

Adam Malik menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan dalam rangka pemenuhan tugas sebagai Menteri Luar Negeri. Adam Malik menyatakan secara lengkap landasan dan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut:

“Politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan kepada dasar filsafah Pancasila. Tujuannya adalah sama dengan tujuan-tujuan revolusi Indonesia, pembangunan suatu masyarakat yang adil dan makmur, dan pembangunan

⁹² *Ibid*, hlm. 579.

dunia baru yang bebas penghisapan manusia oleh manusia atau suatu bangsa oleh bangsa lain”.⁹³

Tindakan yang dilakukan Adam Malik sejalan dengan teori hubungan internasional yang diungkapkan oleh J.C. Johari. Ia menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi yang dilakukan oleh antar negara yang berdaulat atau aktor dan pelaku-pelaku non negara yang perilakunya memiliki dampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Adam Malik sebagai aktor yang ditunjuk negara menggunakan politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Adam Malik memahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut politik luar negeri Indonesia harus dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dunia internasional. Adam Malik melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan luar negeri masa Orde Lama dan merubahnya dengan kebijakan-kebijakan luar negeri baru yang ia ambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Adam Malik adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penyelesaian Konfrontasi Indonesia dan Malaysia

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia bermula saat munculnya ide penggabungan antara Malaya, Serawak, Sabah, Brunei dan Singapura dalam suatu Federasi yang bernama Federasi Malaysia. Ide pembentukan Federasi Malaysia dikemukakan pertama kali oleh pemimpin Malaya yaitu Tengku Abdul Rahman pada tanggal 31 Mei 1961. Tengku Abdul Rahman berkonsultasi dengan Inggris pada pertengahan 1962. Inggris menyetujui usulan tersebut dan langsung membentuk Komisi Cobbold yang bertugas mengurus administrasi pembentukan Federasi

⁹³ Kebijaksanaan Menteri Luar Negeri Adam Malik dapat dilihat dalam lampiran 9.

Malaysia. Federasi Malaysia resmi terbentuk pada tanggal 16 September 1963 yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan wilayah.

Presiden Soekarno menganggap pendirian Federasi Malaysia akan mengganggu revolusi Indonesia serta bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme. Indonesia memandang Federasi Malaysia sebagai “Boneka Inggris” dan bentuk manifesto neokolonialisme yang akan mengepung wilayah Republik Indonesia. Presiden Soekarno secara resmi mengeluarkan seruan “Ganyang Malaysia” sebagai bentuk perlawanan terhadap Federasi Malaysia.⁹⁴ Seruan “Ganyang Malaysia” mendapatkan dukungan penuh dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Tokoh-tokoh PKI seperti Aidit, Lukman dan Soebandrio bahkan meminta agar konfrontasi disegerakan menggunakan jalan militer dengan mempersenjatai buruh dan tani sebagai Angkatan ke-5. Gagasan pembentukan Angkatan ke-5 mendapatkan penolakan dari Angkatan Bersenjata hingga akhirnya Soekarno tidak menyetujui usulan tersebut.

Pertentangan semakin berlanjut hingga akhirnya terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan saling menarik pulang Duta Besar masing-masing. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah No. 1/KOTOE yang berisi pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan seruan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964. Dwikora berisi seruan untuk meningkatkan ketahanan revolusi nasional dan kaum revolusioner di Malaya, Serawak, Sabah dan Singapura untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Operasi

⁹⁴ Merle Calvin Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 539.

Dwikora dilancarkan dengan mengirimkan gerilyawan ke Kalimantan Utara untuk melakukan infiltrasi ke wilayah Malaysia.⁹⁵

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia semakin memanas ketika Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mengeluarkan sikap dengan keluar dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes pada tanggal 7 Januari 1965. Keputusan Pemerintah untuk keluar dari PBB membuat Indonesia dalam keadaan yang cukup sulit. Negara-negara di Eropa dan sebagian negara Asia terkesan menjauh dari Indonesia karena tidak setuju dengan konfrontasi yang dilakukan terhadap Malaysia. Hubungan buruk antara Indonesia dan PBB mengakibatkan negara-negara Barat dan Internasional Monetary Fund (IMF) menarik kembali bantuan kredit yang diberikan. Kondisi ini bertahan sampai terjadinya Gerakan 30 September yang mengubah politik dalam dan luar negeri Indonesia.

Pasca Gerakan 30 September ketegangan antara Indonesia dan Malaysia cenderung menurun, hal demikian terjadi karena fokus pemerintahan terpusat pada penanggulangan dampak dari G30S di dalam negeri. Perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto membuat intensitas “Ganyang Malaysia” semakin berkurang karena PKI sebagai penyokong utama Dwikora sudah dibubarkan. Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dengan dukungan Soeharto berupaya untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 543.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 571.

Adam Malik melakukan langkah pertama dengan cara reorganisasi dan restrukturisasi Kementerian Luar Negeri dari anasir PKI agar usaha normalisasi tidak mendapatkan pertentangan dari dalam. Pada tanggal 30 Maret 1966 Adam Malik menyatakan bahwa Indonesia akan berupaya keras untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 8 Mei 1966 Tun Abdul Razak menyambut baik rencana damai dan mengaku siap untuk mengadakan pembicaraan tanpa melalui pihak ketiga. Thailand mengajukan diri untuk menjadi tempat perundingan pertama dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perundingan pertama digelar di Bangkok pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966. Perundingan dihadiri oleh Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia dan Tun Abdul Razak perwakilan Malaysia. Perundingan Bangkok menghasilkan kesepakatan tentang rencana normalisasi hubungan tanpa syarat dan rencana penandatanganan pakta perdamaian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.⁹⁷

Pada tanggal 11 Agustus 1966 bertempat di Jakarta dilaksanakan penandatanganan persetujuan damai sekaligus pembukaan kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Persetujuan Jakarta ditandatangani oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri dan Tun Abdul Razak yang menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia di Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta.⁹⁸ Isi persetujuan juga memuat kesepakatan dan kesempatan warga Serawak dan Sabah untuk bergabung dengan Federasi Malaysia melalui pemilihan umum yang bebas

⁹⁷ Hidayat Mukmin, *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 106.

⁹⁸ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 325.

dan demokratis.⁹⁹ Adam Malik dalam pidatonya saat penandatanganan persetujuan Jakarta mengapresiasi itikad baik dari Malaysia dan berharap dapat memulai kembali hubungan baik serta dapat bersama-sama menghadapi masalah yang muncul.¹⁰⁰ Pada tanggal 11 Agustus 1966 Soeharto menugaskan kepada Adam Malik sebagai Ketua Delegasi untuk berangkat ke Kuala Lumpur sebagai pertanda pembukaan kembali hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 12 Agustus 1966 Adam Malik bersama 45 anggota delegasi berangkat ke Kuala Lumpur. Dengan demikian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia resmi berakhir.¹⁰¹

3.2.2 Pembentukan Inter-Government Group on Indonesia (IGGI)

Gerakan 30 September memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional. Indonesia mengalami inflasi yang tinggi hingga mencapai 600 persen yang juga merupakan rekor inflasi tertinggi selama Indonesia merdeka. Keadaan semakin memburuk ketika Uni Soviet sebagai kreditur menagih utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai tenggat waktu pembayaran. Utang luar negeri terhadap Uni Soviet digunakan untuk membiayai perebutan Irian Barat dan pembuatan proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin.¹⁰² Utang luar

⁹⁹ Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm.139.

¹⁰⁰ Teks pidato Adam Malik saat penandatanganan Persetujuan Jakarta dapat dilihat dalam lampiran 10.

¹⁰¹ Surat perintah Ketua KOTI Soeharto terhadap Ketua Delegasi Adam Malik dapat dilihat dalam lampiran 11.

¹⁰² Proyek Mercusuar merupakan produk dari politik mercusuar yang dijalankan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan New Emerging Forces. Contoh proyek ini adalah Pembangunan Stadion Utama Senayan, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi dan Monumen Nasional. Lihat dalam Elisabeth Ermuliana Kembaren, "Soekarno and Javanese Sovereignty Concept Case Study: Guided Democracy Era", *PARAPOLITIKA: Jurnal of Politics and Democracy* Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 76.

negeri Indonesia pada akhir tahun 1965 mencapai 2,6 miliar dollar Amerika Serikat.

Adam Malik mendapatkan tugas dari Soeharto untuk memegang kendali kebijakan luar negeri. Ia berkeinginan agar politik luar negeri menjadi alat untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional.

“Berkenaan dengan itu maka sesuai tritura pemerintah akan mengerahkan politik luar negeri kita untuk meningkatkan kemakmuran rakyat,... Hubungan ekonomi luar negeri merupakan alat yang aktif dan positif dalam membangun ekonomi sosialis Indonesia. Terlebih-lebih pada taraf sekarang ini dalam usaha kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional yang mendesak.¹⁰³

Adam Malik menindaklanjuti sambutannya tersebut dengan menghubungi Uni Soviet agar mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran utang luar negeri. Ia sebagai mantan Duta Besar memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet bertemu dengan Andrei Gromiko seorang Menteri Luar Negeri Uni Soviet dan mencapai kesepakatan penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri Indonesia.¹⁰⁴ Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjabat sebagai Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mengumumkan kesediaan Indonesia untuk menerima bantuan luar negeri pada 4 April 1966.

Pada bulan September tahun 1966 bertempat di Tokyo digelar pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara barat dalam rangka membahas tentang kemungkinan Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri. Pada tanggal 23-24 Februari 1967 di Amsterdam digelar pertemuan kedua antara Indonesia dengan

¹⁰³ Sambutan Adam Malik dalam pembukaan Musyawarah Ekonomi Nasional dapat dilihat dalam lampiran 12.

¹⁰⁴ Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Deplu 1945-1970*. Jakarta: Kawal, 1971, hlm.316.

negara-negara barat dan menghasilkan suatu kesepakatan pembentukan Inter-Government Group on Indonesia (IGGI). IGGI merupakan suatu konsorsium internasional penyumbang dana untuk Indonesia. Anggota IGGI adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Perancis, Belgia, Inggris, Australia, Kanada, Jerman Barat dan Italia. IGGI juga beranggotakan badan-badan keuangan internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Pembangunan Asia.¹⁰⁵

Indonesia mendapatkan bantuan dari IGGI dan badan-badan keuangan internasional dalam dollar Amerika Serikat secara berturut-turut sebanyak: 568,9 juta (1969), 601,9 juta (1970-1971), 643,9 juta (1971-1972), 823 juta (1972-1973) dan 856,1 juta (1973-1974) dengan jumlah keseluruhan 3.385 juta Dollar Amerika Serikat.¹⁰⁶ Bantuan dari IGGI terbagi dalam empat bagian, yaitu bantuan kredit devisa, bantuan pangan, bantuan proyek dan bantuan teknik dengan masing-masing dipergunakan untuk meningkatkan produksi di berbagai bidang dan untuk peningkatan kesejahteraan menurut rencana-rencana yang sudah ditentukan. Bantuan kredit devisa digunakan untuk mengimpor bahan-bahan pokok, sedangkan bantuan proyek dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti irigasi, telekomunikasi dan sebagian dialokasikan untuk program Keluarga Berencana (KB). Bantuan teknik diberikan dalam bentuk pendidikan di luar negeri dan pemberian alat-alat laboratorium untuk keperluan riset.

Penerimaan bantuan dari IGGI menimbulkan adanya pertentangan dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pemberian bantuan tersebut akan

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 314.

¹⁰⁶ Adam Malik, *op.cit.*, hlm. 53.

membuat terjadinya penjajahan ekonomi barat terhadap Indonesia. Adam Malik yang merupakan tokoh perwakilan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan dengan IGGI mengadakan dialog dan memberikan penjelasan kepada wartawan bahwa bantuan dari IGGI akan digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi.¹⁰⁷

3.2.3 Pembentukan ASEAN

Pejabat Presiden Soeharto menganggap penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia membawa dampak positif bagi kedua negara setelah Indonesia memulai kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan dengan Malaysia. Soeharto menghendaki adanya kerja sama dalam lingkup yang lebih besar yaitu antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Soeharto menginginkan kerja sama dapat terjalin dalam berbagai bidang seperti militer, ekonomi, politik, teknik dan kebudayaan sehingga dapat mempererat hubungan di antara negara-negara Asia Tenggara.¹⁰⁸ Soeharto juga mengharapkan adanya benteng dan pangkalan yang kuat untuk menghadapi pengaruh komunisme dan kolonialisme. Adam Malik menindaklanjuti instruksi Soeharto dengan mengusulkan pembentukan suatu perhimpunan kerja sama regional di Asia Tenggara.

Usulan pembentukan perhimpunan regional Asia Tenggara mendapatkan respon positif dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Mereka menganggap adanya kepentingan dan permasalahan bersama antara negara-negara Asia Tenggara sehingga diperlukan ikatan solidaritas dalam bentuk suatu organisasi. Pada tanggal 6-8 Agustus 1967 digelar pertemuan para Menteri yang membahas

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁰⁸ Sudibyo, *ASEAN dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1978, hlm. 12.

pembentukan organisasi regional Asia Tenggara.¹⁰⁹ Pertemuan digelar di Bangkok dan dihadiri oleh perwakilan dari negara Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Adam Malik juga mengusulkan nama *Association of South East Asian Nations* sebagai nama resmi organisasi dan mendapatkan persetujuan dari seluruh negara yang hadir.

Sidang memutuskan pembentukan ASEAN yang ditandai dengan ditandatanganinya “Deklarasi ASEAN” pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh perwakilan lima negara yang hadir yaitu Thanat Koman dari Thailand, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura dan Narcisco Ramos dari Filipina.¹¹⁰ Deklarasi ASEAN juga memuat tujuan dari pembentukan ASEAN. Adapun tujuan ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan ASEAN atas kegiatan-kegiatan bersama yang dipupuk oleh rasa perdamaian rumpun bangsa Asia Tenggara.
2. Memajukan perdamaian dan kestabilan regional dengan memegang teguh asas hukum dan keadilan yang mengikat rumpun tersebut serta menghormati prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter).
3. Memajukan kerja sama dan saling membantu di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4. Memberi bantuan satu sama lain untuk mempermudah riset dan penelitian di bidang pendidikan, keahlian, teknik dan administrasi.
5. Memajukan kerja sama yang lebih efektif guna memperluas bidang pertanian dan industri, serta memperbesar volume perdagangan mereka sambil mempelajari permasalahan perdagangan komoditi internasional dan juga untuk memperbaiki taraf hidup rakyatnya.
6. Memajukan pendidikan di Asia Tenggara.
7. Memupuk hubungan erat yang saling menguntungkan dengan lain-lain badan internasional dan regional yang mempunyai persamaan tujuan

¹⁰⁹ *Kompas*, 8 Agustus 1967 dapat dilihat pada lampiran 13.

¹¹⁰ Deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dapat dilihat dalam lampiran 14.

sejalan dengan usaha untuk lebih mempercepat hubungan di antara kelima negara ASEAN.¹¹¹

Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia berhasil meyakinkan anggota-anggota ASEAN lain bahwa organisasi yang dibentuk bukan merupakan organisasi militer atau pakta pertahanan. Adam Malik berpandangan apabila ASEAN merupakan organisasi militer maka akan diperebutkan oleh dua blok dunia sehingga mengakibatkan wilayah Asia Tenggara menjadi rawan dari ancaman perang sehingga diputuskan bahwa ASEAN merupakan wilayah Bebas-Damai dan Netral.¹¹² Adam Malik juga menganggap apabila ASEAN memainkan peran pertahanan maka sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan tidak akan menjadi prioritas.

Adam Malik beranggapan bahwa ASEAN lahir karena adanya kesamaan latar belakang di negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara saat itu sedang menghadapi permasalahan kemiskinan dan kebodohan yang diakibatkan oleh penjajahan yang dilanjutkan dengan pertentangan dua blok pada perang dingin.

“ASEAN lahir di Asia Tenggara di masa penderitaan, kemiskinan dan kebodohan amat menonjol akibat pertentangan kepentingan ekonomi dan konfrontasi ideologi politik. Oleh karena itu dalam pertumbuhannya ASEAN selalu berusaha menjauhkan diri dari terseret dalam jaringan permainan politik tinggi negara-negara super”.¹¹³

ASEAN menyelenggarakan Sidang Tahunan pertama pada tanggal 6-8 Agustus 1968 di Jakarta. Sidang memutuskan memilih Adam Malik sebagai Ketua Sidang menggantikan Thanat Koman. Sidang Tahunan merumuskan proyek-proyek

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Adam Malik, *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1979, hlm. 29.

¹¹³ Adam Malik, *op.cit.*, hlm. 82.

ekonomi yang akan dilaksanakan oleh ASEAN. Adam Malik kembali terpilih sebagai Ketua Sidang pada Sidang Tahunan ke-VII yang digelar pada tanggal 7-9 Mei 1974 di Jakarta. Sidang Tahunan ke-VII menghasilkan suatu kesepakatan perdagangan bebas dan persetujuan membangun kerja sama industri ASEAN. Sidang juga sepakat mengadakan pertemuan Tingkat Tinggi yang akan dilaksanakan oleh para kepala pemerintahan negara anggota.

Pertemuan Tingkat Tinggi atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN digelar pertama kali di Bali pada tanggal 23-25 Februari 1976. KTT ASEAN tersebut dihadiri oleh para kepala pemerintahan masing-masing negara anggota. KTT pertama ASEAN menghasilkan dua kesepakatan yaitu *Declaration of ASEAN Concord* (Deklarasi Kesepakatan ASEAN) dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara).¹¹⁴ Isi kedua pernyataan merupakan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ASEAN di bidang politik dan ekonomi. ASEAN semakin meningkatkan kegiatannya di segala bidang termasuk hubungannya dengan dunia internasional semakin luas setelah KTT pertama yang diselenggarakan di Bali. ASEAN memulai babak baru dengan menjajaki hubungan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Jepang hingga Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

3.2.4 Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat Menteri Luar Negeri Soebandrio tertanggal 20 Januari 1965.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 88.

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes akibat terpilihnya Malaysia sebagai terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia menganggap PBB memberikan pengakuan terhadap Federasi Malaysia yang saat itu sedang berkonflik dengan Indonesia. Indonesia menjadi terisolasi dari dunia internasional setelah keluar dari PBB. Kondisi semakin sulit ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat Gerakan 30 September. Indonesia tidak mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari negara-negara barat dan badan keuangan PBB untuk pemulihan ekonomi.¹¹⁵

Indonesia merubah sikap terhadap PBB setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Pejabat Presiden Soeharto. Soeharto menginginkan Indonesia kembali aktif dalam PBB.¹¹⁶ Indonesia menyatakan keinginan kembali masuk dalam PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant tanggal 19 September 1966. Sekjen PBB mengatakan bahwa permintaan Indonesia harus melalui persetujuan dari Majelis Umum PBB. Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti Sidang Umum ke-21 yang salah satu agendanya membahas penentuan status keanggotaan Indonesia di PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan beranggotakan M. Yusuf, Ruslan Abdulgani, L.N. Palar dan Rusmin Nuryadin.¹¹⁷ Ketua Sidang mengumumkan menerima kembalinya Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.

¹¹⁵ Merle Calvin Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 551-552.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 569.

¹¹⁷ Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa Adam Malik: Merah Putih Berkibar di PBB*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019, hlm. 40.

Keterlibatan kembali Indonesia dalam PBB membuat Indonesia memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua Majelis Umum PBB ke-26 yang digelar pada tahun 1971. Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia dicalonkan oleh negara-negara anggota lain dan terpilih dengan mendapatkan 119 suara dari 125 suara sah.¹¹⁸ Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis Umum PBB periode 1971-1972. Majelis Umum adalah satu dari enam badan utama PBB.¹¹⁹ Majelis Umum merupakan badan yang berwenang menetapkan anggaran dan keanggotaan PBB serta memberikan rekomendasi kepada setiap anggota PBB. Majelis Umum PBB beranggotakan seluruh negara anggota PBB.¹²⁰ Majelis Umum PBB dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari perwakilan negara anggota dan memimpin dalam masa jabatan satu tahun.

Adam Malik dalam pidatonya se usai pelantikan menegaskan semua negara termasuk negara-negara pecahan harus terwakili dalam PBB. Adam Malik juga menegaskan perlunya semua negara baik negara besar atau kecil untuk bekerja sama mencapai perdamaian dan kemajuan dunia. Adam Malik menyerukan agar semua negara memerangi bersama persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dunia seperti masalah pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi perluasan lapangan kerja. Adam Malik menyikapi pentingnya pembangunan sumber daya manusia dengan mencanangkan program Dawarsa Pembangunan PBB. Ia memandang

¹¹⁸ Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa: Adam Malik: Menjadi Ketua Majelis Umum ke-26 PBB*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019, hlm. 2.

¹¹⁹ Pasal 7 ayat (1) menyatakan PBB memiliki enam badan utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan Ekonomi Sosial, Sekretariat dan Mahkamah Internasional. Lihat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional*. Bandung: Angkasa Offset, 1982, hlm. 9.

¹²⁰ D.W Bowwet, *Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djayaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 51.

pembangunan sumber daya manusia melalui program Dasawarsa Pembangunan PBB merupakan hal yang harus dilakukan untuk menciptakan tenaga-tenaga terdidik dan berkualitas global. Sebagai seorang Ketua Majelis Umum Ia berkeinginan agar program Dasawarsa Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh sehingga tidak lagi terdapat kesenjangan antara yang terjadi di Amerika dan Eropa dengan Asia dan Afrika. Ia menilai saat itu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan manusia mengingat telah terjadi pergeseran ketegangan dalam perang dingin dari yang berlandaskan militer menjadi adu kekuatan ekonomi.

Adam Malik menawarkan gagasan agar negara-negara berkembang dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan manusia. Gagasan Adam Malik adalah sebagai berikut:

“Pertama ialah terpusat pada penempatan tenaga-tenaga ahli; pada pemberian bantuan teknik keuangan; dan melatih tenaga-tenaga kerja setempat menjadi tenaga terdidik melalui loka karya dan seminar yang ditunjang dengan pembentukan pusat-pusat riset dimana-mana”.¹²¹

Gagasan yang dicanangkan Adam Malik mengalami hambatan dalam usahanya agar pembangunan manusia dapat dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Seminar dan lokakarya terhambat oleh adanya jurang pembatas yang memisahkan negara kaya dan miskin. Negara-negara miskin mengalami keterbatasan dalam membangun sumber daya manusianya sehingga hanya negara kaya saja yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan maksimal. Dengan demikian usaha Pembangunan negara-negara berkembang tidak mencapai hasil yang diharapkan.¹²²

¹²¹ Adam Malik *op.cit.*, hlm. 185.

¹²² *Ibid*, hlm. 186

Adam Malik sebagai pemimpin Majelis Umum menyadari bahwa PBB mempunyai kelemahan dalam hal pendanaan. Adam Malik menilai bahwa PBB diambang kebangkrutan jika tidak segera dilakukan perbaikan sistem keuangan.¹²³ Persoalan keuangan harus segera dicari penyelesaiannya karena PBB membiayai program-program pangan, pendidikan dan perdamaian dalam upaya menciptakan kesejahteraan dunia. Adam Malik menawarkan solusi dalam mengatasi masalah keuangan PBB.

“Dan di masa saya menjabat Ketua Majelis Umum PBB 1971 saya juga menghimbau semua anggota PBB untuk memberi bantuan untuk ikut mengemban kesulitan keuangan PBB. Saya tekankan pada setiap anggota bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk ikut bertanggungjawab akan kesulitan-kesulitan di bidang keuangan, dan ikut menjamin adanya kemampuan bagi PBB untuk membayar kembali hutang-hutangnya dan kelestarian hidupnya”.¹²⁴

Adam Malik menganggap iuran merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota PBB. Iuran negara-negara anggota diharapkan mampu melunasi utang dan menyelesaikan persoalan keuangan PBB. Usulan Adam Malik mengenai iuran tidak terealisasi sepenuhnya karena minimnya kesadaran dalam diri setiap anggota akan pentingnya bantuan dalam keberlangsungan PBB. Negara-negara dengan ekonomi mapan seperti Israel, Korea Selatan, Iran dan Arab Saudi tidak menjalankan kewajiban iuran secara rutin.

Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB juga mempunyai andil dalam bergabungnya Republik Rakyat Cina (RRC) dalam keanggotaan PBB. Adam Malik dan perwakilan negara-negara dalam sidang Majelis Umum menyetujui masuknya RRC sebagai anggota PBB menggantikan Taiwan. Indonesia melalui Adam Malik

¹²³ *Ibid*, hlm. 191

¹²⁴ *Ibid*.

tetap menerima RRC sebagai anggota PBB sekalipun hubungan bilateral Indonesia dan RRC terputus akibat peristiwa Gerakan 30 September.¹²⁵ Indonesia menganut prinsip bahwa keanggotaan PBB bersifat universal sehingga setiap negara di dunia memiliki hak untuk menjadi anggota PBB.

“Sebagai Ketua Sidang Umum PBB pada waktu itu, saya menyatakan selamat datang bagi Delegasi RRC waktu kita dudukkan mereka di deretan kursi-kursi di ruang sidang bersama-sama dengan ratusan delegasi negara-negara anggota lainnya”.¹²⁶

Adam Malik berharap RRC dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam badan-badan dan pertemuan PBB¹²⁷. RRC menjawab bahwa pihaknya akan melakukan apapun untuk mencapai hal tersebut. Persetujuan Indonesia terhadap masuknya RRC untuk menggantikan Taiwan dalam PBB menjadi preseden pelaksanaan normalisasi hubungan antara kedua negara di tahun-tahun setelahnya.

3.2.5 Penyelesaian Sengketa Luar Negeri

Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia berlandaskan pada politik luar negeri bebas dan aktif.¹²⁸ Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi dan keadilan sosial”. Politik luar negeri Indonesia bersifat anti kolonialisme dan anti imperialisme karena kedua hal tersebut bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

¹²⁵ Adam Malik *op.cit.*, hlm. 180.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 180.

¹²⁷ Litbang Kompas, *op.cit.*, hlm. 59.

¹²⁸ Mohamad Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm. 12.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru diisi dengan politik bertentangan baik sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dan dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan dengan negara-negara di sekitar. Indonesia menyadari bahwa kerja sama tidak akan berhasil jika masih terdapat sengketa di kawasan Asia Tenggara. Indonesia senantiasa membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah seperti yang terjadi Kamboja dan Vietnam.

1. Kamboja

Kamboja mengalami gejolak dalam negeri setelah terjadinya pergantian kekuasaan dari Pangeran Sihanouk kepada Jenderal Lon Nol melalui kudeta militer dan mengganti bentuk pemerintahan menjadi republic pada tahun 1970.¹²⁹ Pangeran Sihanouk kemudian mendirikan pemerintahan pengasingan sementara Jenderal Lon Nol menjadi pemimpin di Kamboja. Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Kamboja dan mengakui pemerintahan Jenderal Lon Nol dengan alasan Indonesia hanya mengakui pemerintahan yang didirikan di ibukota negara yang bersangkutan. Pemerintahan Jenderal Lon Nol dinilai tidak berhasil menjaga stabilitas dan perdamaian karena terus terjadi konflik antara loyalis Pangeran Sihanouk dengan pasukan pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Adam Malik mengadakan konferensi internasional guna membahas penyelesaian masalah Kamboja. Konferensi internasional tersebut digelar di Jakarta pada tahun 1970. Konferensi Jakarta

¹²⁹ Norodom Sihanouk, *War and Hope: The Case for Cambodia*. New York: Pantheon Books, 1980, hlm. 17.

dihadiri oleh perwakilan negara-negara dunia. Amerika Serikat menjadi negara yang ikut memberikan atensi terhadap upaya Indonesia dalam Konferensi Jakarta. Presiden AS Richard Nixon melalui Duta Besarnya di Indonesia Francis Galbraite mengirimkan surat kepada Adam Malik pada tanggal 29 Juli 1970. Isi surat adalah laporan mengenai operasi dan tujuan tentara AS di Kamboja.¹³⁰ Berdasarkan surat tersebut, Amerika Serikat berharap laporannya dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai permasalahan yang terjadi di Kamboja. Adam Malik yang telah mempelajari surat tersebut langsung melaporkannya kepada Presiden Soeharto dengan harapan langkah terbaik dapat diambil dalam upaya penyelesaian konflik di Kamboja.

Pemerintahan Lon Nol juga mendapatkan gangguan dari Vietnam melalui tentaranya yang disebut Vietcong. Vietnam yang hampir memenangkan perang dengan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam berniat memperluas wilayahnya ke Kamboja. Pemerintah Indonesia yang masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan di Kamboja kemudian mengutus Adam Malik untuk melakukan dialog dengan Lon Nol. Adam Malik melaporkan hasil pertemuannya dengan Lon Nol kepada Presiden Soeharto.¹³¹ Ia mengungkapkan bahwa Lon Nol mengharapkan bantuan Indonesia agar Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja serta tidak lagi mencampuri persoalan dalam negeri Kamboja. Pemerintahan Lon Nol tidak bertahan lama setelah mengalami kudeta yang dilakukan oleh Pol Pot. Pol Pot memulai rezim baru dengan nama Khmer Merah. Indonesia tetap

¹³⁰ Surat dari Presiden AS melalui Duta Besarnya mengenai laporan di Kamboja dapat dilihat dalam lampiran 15.

¹³¹ Laporan Khusus Adam Malik terhadap Presiden Soeharto tentang pertemuan dengan Lon Nol. Dapat dilihat dalam lampiran 16.

melanjutkan hubungan diplomatik dengan Kamboja yang dipimpin Pol Pot dengan alasan yang sama yaitu mengakui pemerintahan yang didirikan di ibukota negara yang bersangkutan.

2. Vietnam

Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis sebelum perang dunia kedua. Pasca perang dunia kedua berakhir Prancis mencoba masuk kembali ke Vietnam dengan membonceng Inggris. Pada tanggal 27 April 1954 diselenggarakan konferensi di Jenewa, perjanjian Jenewa membagi Vietnam menjadi dua bagian yaitu Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dipimpin Presiden Ngo Dien Dinh. Vietnam Utara yang berideologi komunis disokong oleh Uni Soviet dan Cina sementara Vietnam Selatan yang berideologi liberal dibantu oleh Amerika Serikat. Vietnam menjadi arena perang dingin antara blok timur dan blok barat yang akhirnya melahirkan Perang Vietnam. Perang Vietnam merupakan perang antara tentara komunis Vietcong dengan Amerika Serikat yang mencoba mempertahankan Vietnam Selatan. Perang Vietnam dijadikan rakyat Vietnam sebagai puncak memperjuangkan kemerdekaan dari kekuatan asing.¹³²

Indonesia yang menerapkan politik tetangga baik ikut terlibat dalam usaha penyelesaian masalah Vietnam. Presiden Soeharto menugaskan Adam Malik untuk bertindak sebagai Ketua Delegasi untuk menghadiri konferensi internasional mengenai Vietnam di Paris pada tanggal 26 Februari 1973.¹³³ Soeharto meminta

¹³² Ruslan Abdulgani, *Asia Tenggara di Tengah Raksasa Dunia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1978, hlm. 5.

¹³³ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1973 kepada Menlu Adam Malik. Dapat dilihat dalam lampiran 17.

delegasi Indonesia untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Adam Malik kemudian hadir dan memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Paris. Adam Malik dalam konferensi menjelaskan sikap Indonesia terhadap konflik Vietnam dan mengaku siap untuk terlibat dalam upaya perdamaian. Konferensi Paris memutuskan agar kedua belah pihak melaksanakan gencatan senjata selama 60 hari dan mewajibkan kedua pihak hadir dalam perundingan yang akan digelar kedepan. Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia diminta untuk bergabung dalam *International Commission for Control and Supervision* (ICCS) yang merupakan suatu komisi pengawasan gencatan senjata di Vietnam Selatan yang bertugas mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran persetujuan Paris. ICCS beranggotakan Polandia, Indonesia, Hungaria dan Kanada. Adam Malik melaporkan hasil konferensi Paris kepada Presiden Soeharto. Ia kemudian ditunjuk sebagai ketua Misi Republik Indonesia Garuda (Misigra).

Misi Republik Indonesia Garuda (Misriga) yang secara operasional dibawah kendali Menteri Luar Negeri serta komandan lapangannya adalah Duta Besar Indonesia untuk Khmer Letnan Jenderal Dharsono. Misi tersebut bertanggungjawab pada pengiriman pasukan perdamaian Kontingen Garuda IV, V dan VII ke Vietnam.¹³⁴ Kontingen Garuda bertugas sebagai tentara perdamaian yang menjaga status quo dan mengawasi evakuasi pasukan dan pertukaran tawanan perang. Amerika Serikat mengapresiasi keterlibatan Indonesia dalam ICCS serta pengiriman Kontingen Garuda melalui surat yang dikirimkan oleh Wakil Menteri

¹³⁴ Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Dharma Bhakti TNI-AD Dalam Tugas Internasional*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD, 1982, hlm. 114.

Luar Negeri Kennet Rush.¹³⁵ Amerika Serikat juga meminta agar Adam Malik sebagai perwakilan Indonesia untuk meneruskan peran dalam ICCS hingga perdamaian di Vietnam dapat terlaksana. Pada tanggal 31 Maret 1975 sebanyak 45 anggota Kontingen Garuda kembali ke Jakarta setelah terjadinya penyerahan kekuasaan pemerintahan Vietnam Selatan di Saigon kepada Republik Sosialis Vietnam. Kementerian Luar Negeri Vietnam mengumumkan secara resmi berakhirnya peranan ICCS pada bulan Juni tahun 1975.

¹³⁵ Surat dari Wakil Menlu AS Kenneth Rush kepada Menlu Adam Malik dapat dilihat dalam lampiran 18.